

BAB III

Analisis Terhadap Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana

Pembakaran Hutan

Terdapat beberapa bentuk kejahatan korporasi, yang salah satunya di bidang lingkungan hidup yaitu dalam bidang kehutanan. Selama 20 tahun terakhir ini kejadian kebakaran atau pembakaran hutan sering terjadi dan menimbulkan banyak sekali kerugian serta keresahan baik di dalam negeri maupun sampai ke negeri tetangga.

Kebakaran hutan terparah terjadi pada tahun 2013 dan menghasilkan tingkat polusi terburuk di kawasan Asia Tenggara. Kebakaran hutan yang menyebabkan kabut asap tebal itu terutama berasal dari hutan-hutan di Sumatera dan Kalimantan, lokasi yang sering digunakan oleh industri *pulp*, kertas dan kelapa sawit.

Dalam laporan yang disusun oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan Bambang Hendroyono dan dimuat dalam sebuah artikel tertanggal 9 September 2015¹ dinyatakan bahwa dari 10 perusahaan yang di wilayah konsesinya terjadi kebakaran hutan itu, ada 5 perusahaan yang diduga berperan dalam pembakaran hutan di Riau, 2 perusahaan di Jambi, dan 3 perusahaan di Kalimantan Tengah. Semua perusahaan itu bergerak di bidang perkebunan dan hutan tanaman.

Tidak adanya pengaturan hukum mengenai kedudukan dan pertanggungjawaban korporasi dalam hukum pidana serta hukum acara

¹ <http://www.dw.com/id/10-perusahaan-dituding-ikut-memicu-kebakaran-hutan/a-18704576>, diakses pada 19 Maret 2017 pukul 20.14 WIB

mengakibatkan timbulnya multitafsir dan pemikiran yang saling berbeda diantara aparat penegak hukum. Hal ini mengakibatkan dalam proses penyidikan dan sampai penuntutan jarang sekali memasukkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana, bahkan tidak sedikit juga jaksa dalam dakwaannya tidak mencantumkan korporasi sebagai pelaku tindak pidana dengan dalih pengurus korporasi sudah dipidana, sudah membayar denda, dan uang pengganti, sehingga korporasi dibiarkan bebas karena kasusnya dianggap selesai.

Bagian analisis ini hendak membahas tentang aspek-aspek yang terkait dengan tanggung jawab korporasi dalam tindakan pembakaran hutan, sebagaimana terjadi menurut laporan Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan di atas.

3.1 Korporasi

Dalam lima kasus yang disebutkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan korporasi merupakan pelaku pembakaran hutan yang terjadi dalam 20 tahun terakhir ini. Tindakan dengan sengaja membakar hutan bertujuan untuk membuka lahan-lahan baru untuk memperluas area lahan perkebunan.

Pembakaran selain dianggap mudah dan murah juga menghasilkan bahan mineral yang siap diserap oleh tumbuhan. Namun, banyaknya jumlah bahan bakar yang dibakar di atas lahan akhirnya akan menyebabkan asap tebal dan kerusakan lingkungan yang luas.

Korporasi merupakan suatu fiksi hukum², karena ia bukanlah orang / manusia pribadi yang dapat bergerak sesuai kemauannya sendiri. Ia tidak memiliki bentuk nyata seperti fisik seorang manusia. Namun ia dapat mengadakan aktivitas sebagai seorang pribadi, seperti membuat transaksi dalam bidang perdagangan dan keuangan, membayar pajak dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan pendapat A.Z. Abidin menyatakan bahwa korporasi dipandang sebagai realita sekumpulan manusia yang diberikan hak sebagai unit hukum, yang diberikan pribadi hukum untuk tujuan tertentu.

Korporasi dalam perkembangan hukum di Indonesia, diakui kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Artinya, ia dapat dijadikan sebagai subjek hukum, baik dalam konteks hukum perdata maupun hukum pidana.

RUU KUHP 2004,³ misalnya, mengadopsi pendirian untuk menjadikan korporasi sebagai pelaku tindak pidana. Hal itu dapat dilihat dari bunyi Pasal 47. yang menyebutkan, "*korporasi merupakan subjek tindak pidana*". Dalam hal ini korban dari tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi tersebut dapat berupa orang, atau orang-orang dan/atau korporasi, atau korporasi-korporasi lain.⁴

Memperhatikan rumusan pertanggungjawaban pidana korporasi sebagaimana dimaksud dalam RUU KUHP tersebut, terlihat bahwa:

- (1) penegasan korporasi sebagai subjek tindak pidana dirumuskan dalam Pasal 44;
- (2) Penentuan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam

² JE Sahetapy, *Kejahatan Korporasi*, PT Eresco, Bandung, 1994, h. 32.

³ Lihat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2004.

⁴ JE Sahetapy, *op.cit*, h. 41.

Pasal 45; (3) Penentuan kapan korporasi dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 46; (4) Penentuan kapan pengurus dapat dipertanggungjawabkan dirumuskan dalam Pasal 47; (5) Penentuan pidana sebagai ultimum remidium bagi korporasi dirumuskan dalam Pasal 48; dan (6) Penentuan alasan pembeda dan pemaaf bagi korporasi dirumuskan dalam Pasal 49.⁵

Kasus pembakaran hutan oleh PT. Kallista Alam, putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO dalam pertimbangan hakim mengenai korporasi yang dimintai pertanggungjawabannya dinilai sebagai berikut:

Unsur “setiap orang” mengandung arti yakni adalah orang atau badan hukum selaku subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan hukum dan dapat pula mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dipergunakan terminologi baru yaitu “setiap orang”, yang didalam ketentuan umum dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk korporasi, sehingga dengan demikian sudah barang tentu harus ada orang / manusia sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan undang-undang. Dalam hal ini dibuktikan dengan terdakwa yang bernama PT. Kallista Alam yang diwakili oleh Subianto Rusyid sebagai direktornya. Dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994, yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah sama dengan terminologi

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, 2003, h. 231-233.

kata “barang siapa” adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku daripada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dengan ini PT. Kallista Alam memenuhi unsur “setiap orang”.

Majelis hakim menilai bahwa oleh karena terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dan perbuatan yang telah dilakukannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya karena peristiwa ini berdampak pada kerugian yang diderita masyarakat dan negara.

3.2 Perbuatan Pidana

Korporasi sebagai subjek hukum juga dianggap dapat melakukan tindakan-tindakan yang memenuhi kualifikasi hukum pidana. Di antaranya unsur-unsur tindak pidana tersebut adalah:

- a. perbuatan yang memenuhi undang-undang;
- b. sifat melawan hukum; dan,
- c. tidak ada alasan pemaaf.

Disebutkan dalam bab Ketentuan Umum, Pasal 1 angka 8 Perma No. 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi,

“Tindak Pidana oleh Korporasi adalah tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang korporasi”.

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah melakukan kesalahan dengan tindakan membakar hutan. Tindakan pembakaran hutan ini dilakukan dengan sengaja untuk membuka sebuah lahan sebagai lahan perkebunan ataupun memperluas lahan perkebunannya. Dengan alasan jika dengan cara membakar itu akan diperoleh tanah yang mempunyai pH yang bagus. Tindakan yang seperti ini jelas dilarang, karena ini suatu bentuk kesengajaan yang bersifat melawan hukum. Menurut Leden Marpaung tindakan pembakaran hutan ini merupakan salah satu jenis tindak pidana kejahatan.⁶

Yang termasuk perbuatan melawan hukum, yang digolongkan sebagai tindak pidana menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1985, tepatnya pada pasal 18 dan Pasal 40 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990, dibagi 2 (dua) macam perbuatan pidana, yakni apa yang tergolong dalam :

- a. Kejahatan.
- b. Pelanggaran.

Pemegang izin usaha pemanfaatan hutan serta pihak-pihak yang menerima wewenang pengelolaan hutan sebagaimana dimaksud diwajibkan melindungi hutan dalam areal kerjanya dimana dalam penjelasannya disebutkan bahwa Kewajiban melindungi hutan oleh pemegang izin meliputi pengamanan hutan dari kerusakan akibat perbuatan manusia, ternak, dan kebakaran.

Selain itu Kebakaran Hutan dan Lahan diatur dalam Pasal 49 s/d 50 sebagai berikut :

⁶ Leden Marpaung, *Op. Cit.* Hal. 30.

1. Pemegang hak atau izin bertanggung jawab atas terjadinya kebakaran hutan di areal kerjanya.
2. Setiap orang dilarang membakar hutan.

Penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, Pasal 50 ayat (3) huruf d :

“Pada prinsipnya pembakaran hutan dilarang.”

“Pembakaran hutan secara terbatas diperkenankan hanya untuk tujuan khusus atau kondisi yang tidak dapat dielakkan, antara lain pengendalian kebakaran hutan, pembasmian hama dan penyakit, serta pembinaan habitat tumbuhan dan satwa. Pelaksanaan pembakaran secara terbatas tersebut harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang.”

Sebagai subjek hukum, korporasi juga berpotensi melakukan pembakaran hutan yang memenuhi unsur umum “setiap orang” atau “barang siapa” dalam rumusan tindak pidana. Khususnya dalam tindak pidana pembakaran hutan, ketentuan yang juga relevan mengatur tindak pidana oleh korporasi adalah Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Kehutanan yang secara jelas menegaskan tanggungjawab bagi pemegang hak atau izin dalam hal terjadi kebakaran hutan di wilayahnya. Menurut Undang-undang Kehutanan, pemegang hak atau izin ini mencakup pula korporasi. Selain itu, Pasal 49 dan Pasal 50 juga mengisyaratkan bahwa korporasi tidak harus menjadi pihak yang “aktif” melakukan pembakaran. Bahkan sekalipun dilakukan oleh pihak lain, asal pembakaran terjadi di dalam areal hak atau izin suatu korporasi, korporasi tersebut tetap harus memikul tanggung jawab hukum.

3.3 Representasi Korporasi Oleh Organ Korporasi

Sebagaimana kita ketahui, korporasi merupakan entitas yang bersifat abstrak. Tidak mungkin menjatuhkan sanksi pidana ke sebuah korporasi berupa pidana

penjara, sehingga konsekwensinya adalah tidak mungkin menuntut suatu korporasi sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan suatu undang-undang pidana apabila dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku pidana adalah kumulasi pidana penjara dan pidana denda. Dengan kata lain korporasi hanya mungkin dituntut dan dijatuhi pidana apabila sanksi pidana penjara dan pidana denda di dalam undang-undang itu ditentukan sebagai sanksi pidana yang bersifat alternative (artinya dapat dipilih oleh hakim).

Namun perkembangan kaedah hukum pidana Indonesia terhadap koporasi, dapat dibebani dengan pertanggungjawaban pidana⁷ atau dapat dikatakan sebagai subjek hukum pidana dengan memperlakukan korporasi seperti manusia (*natuurlijk persoon*)⁸ dan membebani pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dibuat oleh korporasi, sejalan dengan asas hukum bahwa siapa pun sama dihadapan hukum (*principle of equality before the law*).

Dalam Undang-Undang Kehutanan dalam pasal 78 ayat (14) disebutkan,

“Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila dilakukan oleh dan atau atas nama badan hukum atau badan usaha, tuntutan dan sanksi pidananya dijatuhkan terhadap pengurusnya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dikenakan pidana sesuai dengan ancaman pidana masing -masing ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana yang dijatuhkan.”

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam RUU KUHP 2004 pasal 49 menyatakan jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, pertanggungjawaban pidana dikenakan terhadap korporasi dan/atau pengurusnya. Adapun pasal 50 konsep

⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

⁸ M. Haryanto, “Refleksi Ilmu Hukum: *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dan Individualisasi Pidana*”, Edisi Oktober 2012, FH-UKSW. 2012, h. 191.

rancangan KUHP menyatakan bahwa korporasi dapat dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap suatu perbuatan yang dilakukan untuk dan/atau atas nama korporasi, jika perbuatan tersebut termasuk dalam lingkup usaha sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain.⁹

Pertanggungjawaban pidana pengurus korporasi dibatasi sepanjang pengurus mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi (lihat pasal 51 Konsep Rancangan KUHP). Adapun pasal 52 ayat (1), “Dalam mempertimbangkan suatu tuntutan pidana, harus dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan yang lebih berguna daripada menjatuhkan pidana terhadap suatu korporasi.” Ayat (2), “Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dinyatakan dalam putusan hakim”.

Selain itu dalam Pasal 15 Perma No. 13 Tahun 2016 menjelaskan bahwa:

1. *Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atau terdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus, maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalah Pengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.*
2. *Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka atau terdakwa dapat mewakili Korporasi dalam perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).*

Dengan ini diketahui korporasi dalam melakukan suatu tindakan pidana dan diajukan sebagai tersangka atau terdakwa, maka pengurusnya yang mewakili korporasi tersebut.

3.4 Bentuk-Bentuk Pidana

Dalam pidana kehutanan ada dua jenis ancaman pidana pokok yaitu pidana badan / *corporeal punishment* dan denda.

⁹ Muladi dan Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h. 51-52.

Dalam Pasal 78, Bab Ketentuan Pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menyebutkan hukuman bagi yang melanggar pasal mengenai membakar hutan adalah denda.

Lengkapnya adalah sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (3) :

“Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).”

Pasal 78 ayat (4)

“Barang siapa karena kelalaiannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf d, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah).”

Selain pertanggungjawaban pidana, dalam hal pembakaran hutan, korporasi dapat dikenakan sanksi administratif maupun pertanggungjawaban perdata. Untuk sanksi administratif korporasi mendapatkan ancaman antara lain berupa pencabutan izin.

Di samping ketentuan pidana pokok, untuk pidana tambahan berupa pembayaran ganti-rugi juga diwajibkan bagi pelaku pembakaran hutan, termasuk korporasi, dalam Pasal 80 yang bunyinya sebagai berikut

“Setiap perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam undang-undang ini, dengan tidak mengurangi sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 78, mewajibkan kepada penanggung jawab perbuatan itu untuk membayar ganti rugi sesuai dengan tingkat kerusakan atau akibat yang ditimbulkan kepada Negara, untuk biaya rehabilitasi, pemulihan kondisi hutan, atau tindakan lain yang diperlukan”.

Meskipun ancaman pidana sebagaimana diuraikan di atas pada dasarnya berlaku untuk semua subjek hukum yang melakukan tindak pidana di bidang kehutanan, termasuk pembakaran hutan, karena sifatnya pidana yang bersifat korporeal tidak bisa dikenakan terhadap korporasi. Dengan demikian, dalam konteks

tanggung jawab pidana atas korporasi dalam kasus pembakaran hutan, pidana yang secara nyata bisa dijatuhkan hanyalah pidana denda, di samping pidana tambahan seperti ganti-rugi dan pencabutan izin korporasi.

Dalam hal demikian, penjatuhan pidana denda untuk korporasi menjadi jenis pidana utama yang bisa diterapkan. Sementara, ancaman pidana penjara sebenarnya juga memiliki fungsi pencegahan tindak pidana (fungsi deteren), sehingga tidak dapat diterapkannya pidana penjara untuk korporasi bisa mengurangi fungsi deteren pidana yang diancamkan dalam Undang-Undang Kehutanan.